

ABSTRAK

ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

PADA PT. ARAS PUAN CIPI

PEKANBARU

OLEH :

NURFAHMI H.A

10973007206

Penelitian ini dilakukan pada PT. ARAS PUAN CIPI yang beralamat di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Tujuan Penelitian ini adalah Apakah Penerapan akuntansi pajak penghasilan pada PT. Aras Puan Cipi telah sesuai dengan peraturan Perpajakan.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala bagian keuangan dan kepala bagian administrasi. Data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat biaya-biaya yang dibebankan oleh PT. aras Puan Cipi tidak diperkenankan dalam Undang-Undang Perpajakan diantaranya Biaya Sumbangan, Biaya Penyusutan dan Biaya Entertainment..

Kata Kunci : *Biaya Sumbangan, Biaya Eintertainment, Biaya penyusutan*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

“ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PADA PT. ARAS PUAN CIP”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari apa yang disebut sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir penulis dan atas kekurangan ini tentu saja kritik dan saran dari pembaca tentang skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati demi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bekal pengetahuan serta bimbingan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik moral maupun materiil sehingga skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih dan Penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Drs.H.M.Nazir Karim.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau Bapak Dr. Mahendra Romus,Sp, M.Ec

3. Bapak Dony Martias, SE,MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 UIN SUSKA Riau.
4. Buk Ade Ria Nirmala,SE,MM selaku pembimbing dan penasehat akademis, yang telah banyak memberikan bantuan dan nasehat selama perkuliahan dan membantu memberikan arahan serta bimbingan,ilmu,motivasi,kesabaran dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Khairil Henry,SE,M.Si,Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulisan sampai skripsi ini selesai.
6. Ibu Desrir Miftah,SE,MM,Ak, Sekretariat Jurusan Akuntansi S1 atas perhatiannya.
7. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah mendidik dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak Pimpinan beserta karyawan PT. Aras Puan Cipi Pekanbaru yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua, Husni Thamrin (papa) dan Armianti (mama) yang telah memberikan doa serta dukungan baik moril maupun materiil yang tidak terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Buat Sri Murni Widarni, terima kasih atas dukungannya dan pengertiannya selama penulis melakukan penelitian dan penyelesaian skripsi ini.
11. Buat sahabatku very revan, Ari, Putra, roy, serta Teman-teman SD Ade taufik, Rio, James sertaTeman-teman seperjuangan dari angkatan '09 di Jurusan

Akuntansi khususnya local C dan konsentrasi Akuntansi Perpajakan dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.sekali lagi Terima Kasih.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal saleh. Penulis juga mendoakan semoga Allah SWT memberikan berkah dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin.

Pekanbaru, Januari 2013

NURFAHMI. HA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Metode Penelitian	4
E. Sistematika Penulis	6
BAB 2 : TELAAH PUSTAKA	
A. Pengertian Akuntansi	8
B. Pengertian Pajak	10
C. Pengertian Pendapatan	11
D. Pengertian Pajak Penghasilan	13
E. Subjek Pajak	14
F. Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak	17
G. Objek Pajak	18
H. Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak	20
I. Pengelompokan Penghasilan	22
J. Biaya-biaya Yang Diperkenankan Dalam UU Perpajakan	24
K. Biaya Entertainment	26
L. Biaya-biaya Tidak Boleh Sebagai Pengurangan Penghasilan Dalam UU Perpajakan	31

M. Pengelompokan dan Tarif Penyusutan	32
N. Amortisasi	40
O. Tarif Pajak Penghasilan	41
P. Pembukuan Dalam Perpajakan	44
Q. Akuntansi Pajak	44
R. Pajak Tangguhan	47
S. Pajak Dalam Islam	51

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan	57
B. Struktur Organisasi	57

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perhitungan Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Perpajakan	61
B. Perhitungan Laba Menurut UU	63
C. Penyajian Aktiva Tetap dalam Neraca	67

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 : Pengelompokan Aktiva Tetap, Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud	29
Table II. 2 : Jenis jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam kelompok I	31
Tabel II. 3 : Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok II	32
Tabel II. 4 : Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok III	34
Tabel II. 5 : Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam kelompok IV	36
Tabel II. 6 : Masa Manfaat Dari Tarif Amortisasi Harta tak berwujud	37
Tabel II. 7 : Contoh PPh Final	42
Tabel IV.1 : Laporan Laba/Rugi	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1 : Struktur Organisasi	56
Gambar III. 2 : Laporan Koreksi Fiskal	62

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mengandung arti penting sebagai fungsi badgeter (penerimaan). Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.dan fungsi regulered (mengatur), pajak berfungsi sebagai alat mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Perpajakan Indonesia sekarang ini menganut *sistem self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang. Pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sector pajak, agar bangsa Indonesia lebih mandiri membiayai pembangunan nasional. Sistem dan mekanisme pemungutan pajak lebih menumbuhkan kesadaran dalam membayar pajak.para wajib pajak tidak dipandang sebagai obyek melainkan sebagai subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan yang diatur dalam UU No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

berlaku sejak 1 Januari 1984. UU ini sudah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir diatur dalam UU Nomor 36 tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak. Dengan demikian UU tersebut menjamin kepastian hukum juga memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak.

PT. Aras Puan Cipi merupakan wajib pajak dalam negeri yang berada di Pekanbaru. Perusahaan bergerak dibidang jasa kolam renang. Untuk menunjang kegiatan perusahaan membangun kantor dan 2 unit kolam renang untuk anak-anak dan dewasa. Dari laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terlampir jumlah peredaran usaha PT.Aras Puan Cipi sebesar Rp.286.189.000 dengan jumlah pembayaran pajak tahun 2011 sebesar Rp.2.097.809

Dari laporan keuangan dan daftar SPT PT. Aras Puan Cipi terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

PT. Aras Puan Cipi memasukkan biaya entertainment sebesar Rp.3.500.000 sebagai pengurangan penghasilan, sedangkan biaya entertainment pada prinsipnya boleh dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak, akan tetapi wajib pajak harus membuat daftar nominatif dalam SPT Tahunan. Dari laporan SPT PT. Aras Puan Cipi ternyata tidak melampirkan daftar nominatif dalam SPT tersebut. Oleh karena itu PT. Aras Puan Cipi harus melakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 3.500.000,-

Perusahaan memasukkan biaya sumbangan Rp. 5.500.000, sebagai pengurangan penghasilan. Biaya tersebut sementara itu menurut UU No 36 Tahun

2008, UU PPh tidak boleh sebagai pengurangan penghasilan bruto, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

Dalam menghitung penyusutan perusahaan menggunakan metode garis lurus. perusahaan mengelompokkan aktiva tetap berwujudnya ke dalam tiga kelompok, kelompok pertama inventaris kantor dengan tarif penyusutan 25%, kelompok kedua kendaraan dengan tarif penyusutan 12% dan kelompok ketiga bangunan 12%. Menurut Undang-undang perpajakan kendaraan termasuk aktiva tetap berwujud kelompok I dengan tarif penyusutan selama 4 tahun (25%), dan bangunan permanen termasuk aktiva tetap berwujud kelompok II dengan tarif penyusutan selama 20 tahun (5%) .

Dengan adanya permasalahan tersebut penulis tertarik mengadakan penelitian yang ruang lingkupnya sebatas permasalahan yang dibahas yang kemudian lebih lanjut dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :“ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PADA PT. ARAS PUAN CIPI PEKANBARU”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Apakah Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan pada PT. Aras Puan Cipi telah sesuai dengan peraturan perpajakan?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui Apakah Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan pada PT. Aras Puan Cipi Lebih sesuai dengan Peraturan Perpajakan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian tersebut adalah

- a. Dapat dijadikan sebagai informasi bagi manajemen perusahaan dalam melakukan akuntansi pajak sesuai dengan sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam menerapkan UU perpajakan dalam menghitung penghasilan kena pajak.
- c. Dari hasil penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai referensi bagi peneliti hal yang sama yang akan datang.
- d. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis bagaimana praktek penerapan UU perpajakan di PT. ARAS PUAN CIPI.

D. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi adalah :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. ARAS PUAN CIPI Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.

2. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan pada 24 September 2012.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah :

- a. Data Primer, yaitu wawancara dengan bagian akuntansi/keuangan tentang tata cara perhitungan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang sudah ada seperti neraca, laporan laba rugi, dan surat pemberitahuan tahunan (SPT) tahun 2011 dan struktur organisasi yang diperoleh dari bagian administrasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu dengan melakukan Tanya jawab dengan bagian akuntansi/keuangan serta pimpinan PT.ARAS PUAN CIPI untuk mendapatkan data tentang tata cara penghitungan pajak penghasilan.

- b. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data perusahaan seperti neraca, laporan laba-rugi serta SPT pajak PT.ARAS PUAN CIPI Pekanbaru

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif yang mana semua data yang telah terkumpul dianalisis dengan menghubungkan antara penghitungan pajak penghasilan sesuai dengan UU perpajakan dan penerapan akuntansi pajak perusahaan dengan standar akuntansi yang berlaku, yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai bagian akhir penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini dibagi menjadi enam bab yang terbagi lagi dalam beberapa sub bab yang terdiri dari sebagai berikut :

- BAB I Dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II Bab ini menguraikan beberapa teori perpajakan yang digunakan sebagai pendukung penulis yaitu mengenai pengertian akuntansi, pengertian pajak, yang tidak termasuk subyek pajak, obyek pajak, penghasilan yang bukan obyek pajak, pengelompokan penghasilan, biaya-biaya yang diperkenankan dalam UU perpajakan, biaya-biaya yang tidak boleh sebagai pengurangan penghasilan dalam UU

perpajakan, pengelompokan dan tarif penyusutan, amortisasi, tarif pajak penghasilan, pembukuan dalam perpajakan, akuntansi pajak.

- BAB III** Dalam bab ini berisikan gambaran umum perusahaan meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan aktivitas perusahaan.
- BAB IV** Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan meliputi jenis-jenis pajak perusahaan, perhitungan laba menurut SAK, perhitungan laba menurut UU perpajakan dan penyajian dalam laporan keuangan.
- BAB V** Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan serta saran-saran hasil penelitian yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi perusahaan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan.(Donald E. Kieso,2007:4)

Penulis lain memberikan definisi akuntansi sebagai berikut :

1. Akuntansi adalah seni pencatatan,pengklasifikasian, dan pengikhtisaran, dengan aturan baku dan dalam satuan uang, transaksi dan peristiwa yang paling tidaksebagian darinya, memiliki karakter keuangan, dan selanjutnya interpretasi atas hasilnya.(Ahmed Riahi Belkaoui,2006:128)
2. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan.(Carl S. warren,2009:9)
3. Akuntansi secara luas adalah suatu sistem yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.(Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati.2007:1)

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut menunjukan bahwa akuntansi bukan saja hanya mencakup fungsi pencatatan dalam menghasilkan informasi keuangan tetapi juga menyangkut fungsi-fungsi lainnya

yang pada dasarnya bertujuan menyediakan informasi yang bersifat financial kepada siapa saja yang memerlukan data informasi tersebut. Dengan demikian akuntansi dapat diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan yang sifatnya lebih luas dari pada teknik-teknik pencatatan semata.

Pengertian Akuntansi berdasarkan tujuannya adalah dimungkinkannya penyediaan informasi yang bersifat financial kepada siapa saja yang memerlukannya untuk mencapai tujuan tersebut maka akuntansi memerlukan teknik antara lain teknik pencatatan, teknik pengawasan, teknik penyajian laporan keuangan, teknik pemeriksaan hasil pencatatan dan sebagainya sehingga data yang di sajikan sebagai bahan informasi merupakan data yang dipertanggungjawabkan.

Akuntansi atau ada juga yang menyebutkan akunting adalah bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode.

Selanjutnya informasi akuntansi dapat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini terdapat adanya perbedaan antara manajemen perusahaan yang menyusun informasi akuntansi ini mempunyai tingkat komunikasi dalam bahasa yang sama maka manajemen perusahaan harus mempunyai standar atau berdasarkan prinsip akuntansi dalam menyusun penafsiran informasi keuangan tersebut.

B. PENGERTIAN PAJAK

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar oleh rakyat kepada Negara, dimana pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang

berasalkan dari rakyat dan penggunaannya untuk kepentingan rakyat yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah Negara.

Pengertian pajak yang diungkapkan oleh beberapa ahli berikut ini, umumnya memiliki beberapa kesamaan seperti yang diungkapkan menurut Undang-Undang No 36 tahun 2008 (pasal 1 angka 2 UU KUP) tentang perpajakan adalah sebagai berikut :

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Drs. Muda Markus & Lalu Henry Yujana (2002 : 1)

Pajak adalah harta karyawan (swasta) yang berdasarkan UU sebagiannya wajib memberikan oleh rakyat kepada Negara tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari Negara, serta bukan merupakan penalty yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan Negara dan sisanya, jika ada digunakan untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH (2011 : 1)

Pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof.Dr.P.J.A. Adriani (2005 : 12)

Pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah Negara iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan UU, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaan.
3. Tanpa jasa timbale balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

C. Pengertian Pendapatan

Menurut Donald dkk (2005 : 69)

Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan dalam aktiva entitas atau pelunasan kewajiban atau kombinasi dari keduanya selama satu periode yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari satu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas yang lain merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari satu kesatuan tersebut. (Bastian,2006:146)

Pendapatan suatu perusahaan diperoleh sepanjang tahap siklus operasi yaitu saat pesanan, produksi, penjualan dan penghasilan. Seperti dalam perusahaan jasa proses penciptaanya dimulai dari pembuatan persetujuan pemberian jasa sampai terjadinya proses penagihan atas balas jasa. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah kapan saat yang tepat untuk melakukan pengakuan pendapatan dalam siklus tersebut.

Sehubungan dengan pengakuan pendapatan Ahmed Belkaoni (1998:16) menyatakan pengakuan selama produksi :

1. Pendapatan sewa, bunga dan komisi diakui pada saat diperoleh, jika terdapat kontrak atau persetujuan sebelumnya yang merinci kenaikan bertahap dalam klaim atas langganan.
2. Seseorang atas sebuah perusahaan yang memberikan jasa perusahaan yang memberikan jasa profesional atau yang serupa mungkin lebih baik menggunakan dasar akrual untuk pengakuan pendapatan. Kalau sifat dari klain terdapat pelanggan merupakan fungsi dari professional jasa yang memberikan.
3. Pendapatan atas kontrak jangka panjang diakui atas dasar kemajuan pelaksanaan kontruksi atau presentase penyelesaian di hitung dengan :

- a. Taksiran perekayasaan atas pekerjaan atas dilaksanakan sampai tanggal bersangkutan dibandingkan dengan total pekerjaan yang harus diselesaikan menurut syarat-syarat kontrak.
 - b. Total biaya yang dikeluarkan sampai tanggal bersangkutan dibandingkan dengan total biaya ditaksir untuk total proyek dalam kontrak.
- 4. Pendapatan atas kontrak ditambah honorarium tetap lebih baik diakui atas dasar akrual.
- 5. Perubahan-perubahan aktiva karena pertumbuhan memberikan kenaikan pendapatan, walaupun transaksi harus terjadi sebelum pendapatan diakui dalam contoh ini, namun pendapatan menurut pertumbuhan didasarkan pada penelitian komprehensif.

D. Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut Azhari (2008 : 3) adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha atau kegiatan di Indonesia.

Sedangkan menurut Prabowo (2003 : 3) pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan.

E. Subyek Pajak

Definisi subyek pajak penghasilan adalah orang pribadi atau badan yang menurut UU perpajakan dinyatakan sebagai subyek hukum yang dapat dikenakan pajak.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 2.

1. Yang menjadi subyek pajak adalah :
 - a. Orang pribadi
 - b. Badan
 - c. Bentuk usaha tetap
2. Subyek pajak yang terdiri dari Subyek pajak dalam Negeri dan Subyek pajak Luar Negeri.
3. Yang dimaksud subyek pajak dalam Negeri adalah
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat, berkedudukan di Indonesia.
 - b. Badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
4. Subyek pajak luar Negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- 5. Yang dimaksud badan usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia selama tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :
 - a. Tempat kedudukan manajemen
 - b. Cabang perusahaan
 - c. Kantor perwakilan
 - d. Gedung kantor
 - e. Pabrik
 - f. Bengkel

- g. Gudang
 - h. Ruang untuk promosi dan penjualan
 - i. Pertambangan dan pengalihan sumber alam
 - j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
 - k. Perikanan,perternakan,pertanian,perkebunan,atau kehutanan
 - l. Proyek kontruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
 - m. Pemberian kerja dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
 - n. Orang tau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukan tidak bebas.
 - o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.
 - p. Computer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet
6. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak menurut keadaan sebenarnya.

F. Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak

Berdasarkan ketentuan UU No. 36 tahun 2008 pasal 3 yang tidak termasuk Subyek Pajak sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah :

- a. Badan perwakilan Negara Asing
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik,dan konsulat atau Pejabat-pejabat lain dari Negara Asing,dan orang-orang yang diperbentuk kepada mereka yang berkerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka,dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan,dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

G. Obyek Pajak

Obyek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya. penghasilan menurut UU pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang termasuk obyek pajak antara lain :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, dan lain-lain.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta termasuk :
 1. Antara pihak-pihak yang bersangkutan. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal.
 2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena penghasilan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.

3. Keuntungan karena likuidasi, pengabungan peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha.
 4. Keuntungan karna pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan.
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - g. Deviden.
 - h. Royalti.
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - k. Keuntungan karena pembebasan hutang.
 - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - n. Premi asuransi.
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.

- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- s. Surplus Bank Indonesia.

H. Penghasilan Yang Bukan Obyek Pajak

Penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak atas penghasilan tertentu.UU No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (3) pajak penghasilan memberikan pengecualian sebagai obyek pajak atau tidak dikenai pajak penghasilan walaupun menurut definisi UU pajak penghasilan suatu penerimaan atau pertambahan kemampuan ekonomis merupakan penghasilan.

Yang dikecualikan dari objek pajak pasal 4 ayat (3) huruf a adalah :

- a. 1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

b. Warisan

c. Harta termasuk setoran yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

d. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau peroleh dalam bentuk natural dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
2. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

- g. Iuran yang diterima atau perolehan dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang di bayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana yang dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- j. dihapus
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
 - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan:
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan

- n. Bantuan dan santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

I. Pengelompokan Penghasilan

Untuk kepentingan perpajakan, penghasilan yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penghasilan dapat dikelompokkan berdasarkan arus kas masuk atau arus pengalihan tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak yaitu :

1. Penghasilan dari pekerja dibedakan atas :
 - a. Penghasilan sehubungan pekerjaan tidak bebas yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi
 - b. Penghasilan dari pekerja bebas yang diterima wajib pajak orang pribadi yang bukan pegawai karena melakukan suatu pekerjaan bebas.
2. Penghasilan dari kegiatan yaitu penghasilan yang diperoleh karena ikut dari serangkaian tindakan termasuk rapat, sidang, seminar dan lain-lain.
3. Penghasilan dari modal yang berupa penghasilan dari harta bergerak (seperti: bunga, royalty) yang tidak bergerak (seperti : sewa tanah, rumah) atau dari harta yang tidak dikerjakan.
4. Penghasilan lain-lain seperti hadiah, undian, dan lain-lain.

J. Biaya-Biaya Yang Diperkenankan Dalam Undang-Undang Perpajakan

Adapun biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto di atur dalam pasal 6 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008 antara lain:

(1) Besarnya penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji;
 3. bunga, sewa, dan royalty;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

- b. peanyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A.
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- d.kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. biaya bea siswa, magang dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jenderal pajak; dan
 - 3. Telah diserahkan perkara penghasilan kepada pengadilan dalam negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan

piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.

4. syarat sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf k;

i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

l. biaya pembangunan dan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.;

m. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.;

n. sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.;

K. Biaya “entertainment” dan sejenisnya

Biaya entertainment, representase, jamuan dan sejenisnya sepanjang untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan

dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Contoh biaya entertainment, reorentase, jamuan dan sejenisnya adalah jamuan makanan untuk relasi bisnis. Wajib pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan.

Bagi Wajib Pajak yang mengurangi biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun 2011 daftar nominative yang berisi :

- a. Nomor urut
- b. Tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- c. Nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- d. Alamat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- e. Jenis entertainmet dan sejenisnya yang telah diberikan.
- f. Jumlah (Rp) entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- g. Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas berisi :

1. Nama
2. Posisi

L. Biaya-biaya Yang Tidak Boleh Sebagai Pengurangan Penghasilan Dalam UU Perpajakan

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 9 Biaya-biaya yang tidak boleh sebagai pengurangan penghasilan sebagai berikut :

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

- b. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi,
 - 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan,
 - 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk kehutanan;
 - 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah produksi;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dana asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu

dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan perpajakan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang dalam pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- h. pajak penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang yang bidang tentang perpajakan

M. Pengelompokan dan Tarif Penyusutan

Dalam Undang-Undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 pengelompokan aktiva tetap, masa manfaat, dan tarif penyusutan adalah sebagai berikut :

Tabel II.1

**Pengelompokan Aktiva Tetap, Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta
berwujud**

Kelompok harta berwujud	Masa manfaat	Tarif penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12.50%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6.25%	12.50%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak permanen	10 tahun	10%	

Sumber : Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 11.

Dalam Undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008, penyusutan dapat dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan harta tersebut atau dengan persetujuan direktur jenderal pajak, wajib pajak dikenakan melakukan penyusutan mulai pada bulan tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai penghasilan.

Sesuai dengan keputusan menteri keuangan No.138/KMK.03/2002, pengelompokan sesuai dengan keputusan masing-masing aktiva tetap dalam kelompok I, II, III, dan IV berikut disajikan jenis-jenis harta berwujud yang dimasukkan berdasarkan kelompoknya.

Dalam menghitung besarnya penyusutan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2008, aktiva tetap berwujud dibagi menjadi empat golongan, yaitu :

a. Golongan 1

Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 Tahun

b. Golongan 2

Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 Tahun

c. Golongan 3

Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 Tahun

d. Golongan 4 (Golongan Bangunan) :

Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 Tahun.

Harta berwujud yang berupa bangunan di bagi menjadi dua, yaitu:

1. Permanen masa manfaatnya 20 Tahun.
2. Tidak permanen: bangunan yang bersifat sementara, terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan. Masa manfaatnya tidak lebih dari 10 Tahun.

Tabel II.2**Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok I****Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.03/2002**

No	Jenis usaha	Jenis harta
1	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel atau peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja bangku, kursi, almari dan sejenis yang bukan dari bangunan b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin foto copy Accounting Mechine c. Perlengkapan lainnya seperti amplier tape/cassette, video, recorder, televisi, dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda. e. Alat perlengkapan khusus. f. Alat dapur untuk memasak makanan dan minum.
2	Pertanian, perkebuanan, kehutanan, perikanan.	Alat yang digerakkan dengn bukan mesin. .
3	Industry makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindahkan seperti pemecah kulit, penyosong, pengering, pallet dan sebagainya.
4	Perhubungan pergudangan dan komunikasi. Industri semi konduktor	Mobil taxi, bus, damtruck yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industry semi konduktor	Flash memory tester, writer machine, biporat test sistem, elimination, pose chaker.

Tabel II.3**Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok II****Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.03/2002**

No. Urut	Jenis usaha	Jenis harta
1.	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a) Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya merupakan bagian dari bangunan. Alat pengukur seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya. b) Computer, printer, scanner dan sejenisnya. c) Mobil, bus, truck, speedboat dan sejenisnya. d) Caontainer dan sejenisnya.
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> a) Mesin pertanian/perkebunan seperti tracktor dan mesin bajak, penggaruk penanaman dan penebar benih. b) Mesin yang mengolah atau menghasilkan/memproduksi bahan/ barang pertanian dan perikanan.
3.	Industri makanan dan minuman	<ul style="list-style-type: none"> a) Mesin yang mengolah produk asal binatang unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b) Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggiilingan

		<p>kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilaingan beras dan gandum.</p> <p>c) Mesin menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman.</p> <p>d) Mesin menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan.</p>
4.	Mesin industri	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan misalnya, mesin jahit, pompa air.
5.	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu.
6.	Konstruksi	Peralatan yang digunakan seperti truck berat, dump truck, crane bulldozer.
7.	Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	<p>a) Truck kerja untuk mengangkut dan membongkar muat, truck peron, truck ngangkang dan sejenisnya.</p> <p>b) Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus, dibuat untuk mengangkut barang tertentu termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya.</p> <p>c) Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal ruck, crane terapung dan sebagainya.</p> <p>d) Perahu layar pakai atau tanpa motor.</p>
8.	Telekomunikasi	Perangkat pesawat telepon, pesawat telegram termasuk

		esawat pengiriman dan penerima radio telegraf dan radio telepon.
9.	Industri semi konduktor	Auto frame loader utomatic logic handler, baking over,ball shear tester, bipolar test handler (automatic), claning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine dicer, diebonder, die sear test, dynamic burning, system oven,dynamic testhundler, full automatic hundler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter, remover machine, laser marker logig test system, molding, maonter MPS automatic MPS manual, OS tester manual, pass oven, pose chaker, refom machine, tiebar cut press, trimming forming machine, wire bonder, wire full tester.

Sumber : Azhari,2008:81-82

Tabel II.4

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok III

Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.03/2002

No. Urut	Jenis usaha	Jenis harta
1.	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelican.
2.	Permint alan, pertenunan dan pencelupan	a) Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, serat-serat buatan, woll da bulu hewan lainnya, lemari permadani, kain-kain bulu, tule).

		b) Mesin-mesin yang untuk premeration, bleacing dilyng, printing, finishing, teksturing packing.
3.	Perkayuan	<p>a) Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk industry kimia dan industry yang ada hubungannya dengan industry kimia persenyawaan organis dan logam mulia, elemen radio, isi top, bhan kimia organis, produk farmasi pupuk, oabt celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinonida, wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun detergen, zat albumina, perekat, peledak, produk politeknik, korek api, barang fotografi dan sinema.</p> <p>b) Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (mislanya dammar tiruan, bahan palstik dari selusa, karet sintetik, skaret tiruan, kulit samak dan kulit mentah).</p>
4.	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (mislanya, mesin mobil dan mesin kapal).
5.	Perhubungan dan komunikasi	<p>a) Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus, dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu.</p> <p>b) Kapal yang dibuat khusus mengelak atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal truck, cran terapung.</p> <p>c) Dok terapung.</p> <p>d) Perahu layar pakai atau tanpa motor.</p> <p>e) Pesawat terbang dan helicopter segala jenis.</p>
6.	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Sumber : Azhari,2008:82-84

Table II.5**Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok IV****Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.03/2002**

No. Urut	Jenis usaha	Jenis harta
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2.	Perhubungan dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Lokomotif uap dan terder atas rel b) Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batrai/listrik dari sumbu luar. c) Lokomotif atas rel lainnya. d) Kereta gerbong penumpang dan barang, termasuk container khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat. e) Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu. f) Kapal yang dibuat khusus untuk mengelak atau mendorong kapal-kapal suar.

Sumber :Azhari 2008:28

N. Amortisasi

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpajakan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang dipergunakan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas

pengeluaran atau nilai sisa buku dan pada akhir manfaat diamortisasi sekaligus dengan sarat taat asas.

Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*starigh line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan amortisasi.

Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat diamortisasi ditetapkan sebagai berikut :

Tabel II.6

Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi Harta Tak berwujud

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis lurus	Saldo menurun
kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Sumber : Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 11A

O. Tarif Pajak Penghasilan

Dalam pemungutan pajak, tarif merupakan tolak ukur untuk menetapkan beban pajak, selain pembagian penghasilan kena pajak (PKP) dalam lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*). Undang-undang pajak penghasilan

menganut pendekatan tarif berbeda antara tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi dan tarif pajak untuk badan.

PPh terhutang dari wajib pajak dalam suatu tahun pajak untuk wajib pajak dalam negeri (badan, orang pribadi) dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia dihitung dengan menerapkan tariff utama pajak dikalikan terhadap penghasilan kena pajak.

Tarif umum pajak menurut pasal 17 UU No 17 Tahun 2001 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagi berikut lapisannya :

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.25.000.000,00	5%
Diatas Rp.25.000.000,00 s.d Rp.50.000.000,00	10%
Diatas Rp.25.000.000,00 s.d Rp.50.000.000,00	15%
Diatas Rp. 100.000.000 s.d Rp.200.000.00	25%
Diatas Rp.200.000.000,00	35%

Contoh :

Perhitungan pajak terutang untuk wajib pajak orang pribadi

Misalkan jumlah penghasilan kena pajak WP A Rp. 250.000.000,-

Pajak penghasilan terutang:

5% x Rp. 25.000.000,-	=Rp 1.250.000,-
10% x Rp.25.000.000,-	=Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 50.000.000,-	=Rp. 7.500.000,-
25% x Rp. 100.000.000,-	=Rp.25.000.000,-
35% x Rp. 50.000.000,-	=Rp.17.500.000,-
Jumlah PPh terutang	=Rp.53.750.000,-

b. Bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10%
DiatasRp.50.000.000,00s.d Rp. 100.000.000,00	15%
Diatas Rp. 100.000.000,00	30%

Contoh:

Perhitungan pajak terutang untuk wajib pajak badan dalam negeri bentuk usaha tetap.

Misalkan jumlah penghasilan kena pajak sebesar Rp. 250.000.000,- maka jumlah pajak terutang dihitung sbb:

Pajak penghasilan terutang

10% x Rp. 50.000.000,-	= Rp. 5000.000,-
15% x Rp. 50.000.000,-	= Rp. 7.500.000,-
30% x Rp. 150.000.000,-	= <u>Rp 45.000.000,-(+)</u>
Jumlah PPh terutang	Rp. 57.500.000,-

P. Pembukuan Dalam Perpajakan

Sesuai dengan pasal 1 huruf v UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No.9 Tahun 1994 pembukuan didefinisikan sebagai berikut:

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban, atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terutang pajak penambahan nilai, yang dikenakan pajak pertambahan nilai dengan tarif 0% dan yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir”.(Shopar lumbatoruan,2000:5)

Tujuan pembukuan dalam perpajakan adalah untuk mengetahui besarnya perhitungan pajak yang terutang seperti pajak penghasilan, pajak ekspor, pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan sebagainya.

Q. Akuntansi Pajak

1. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak pada setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Sebagai pembayaran dimuka atau angsuran, pajak penghasilan pasal 25 merupakan

kredit pajak terhadap pajak yang diperkirakan akan terutang atas seluruh penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan. Pada akhir tahun pajak, angsuran pajak penghasilan pasal 25 dapat dikurangkan dari pajak penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan. Pada prinsipnya wajib pajak harus diharuskan untuk membayar angsuran pajak penghasilan seperti diatur dalam pasal 25 Undang-undang pajak penghasilan, tujuan angsuran tersebut adalah agar wajib pajak tidak terlalu besar terutang penghasilan pada akhir tahun pajak.

Contoh:

Diasumsikan PT.XYZ membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar Rp.25.000.000,00 ke kas Negara. Jurnal pencatatan pembayaran adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Debit	Kredit
	PPh pasal 25 yang dibayar dimuka Kas	Rp.25.000.0000,-	Rp.25.000.000,-

Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final

Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak setelah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain

yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan.

Table II.7

Contoh PPh Final

No.	Jenis penghasilan	Tariff	Dari	Dasar hukum
1	Bunga deposit, Tabungan	20%	Bunga	Ps 4 (2) UU PPh
2	Bunga dan premium SWAP/Forward	20%	Bunga dan premium	Ps 4(2) UU PPh
3	Bunga diterima anggota koperasi	15%	Bunga	Ps 4 (2) UU PPh
4	Transaksi saham serta sekuritas lainnya di bursa efek antara lain saham diterima orang pribadi atau badan	0.1%	Bruto	Ps 4 (2) UU PPh
5	Saham diterima pendiri	0,5%	Seluruh saham pendiri	Ps 4 (2) UU PPh
6	Bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon	20%	Bruto bunga	Ps 4 (2) UU PPh
7	Diskonto obligasi tanpa bunga	20%	Selisih bunga	Ps 4 (2) UU PPh
8	Pengalihan tanah atau bangunan	5%	Nilai tertinggi antara harga jual dan NJOP	Ps 4 (2) UU PPh
9	Sewa tanah atau bangunan	10%	Sewa bruto	Ps 4 (2) UU PPh
10	Jasa konsultan manajemen	4%	Bruto PPn	Ps 4 (2) UU PPh
11	Jasa maklon internasional	2,1%	Biaya pembuatan bahan baku	KMK/543/2003
12	Penerbangan luar negeri	2,64%	Bruto	KMK/417/1996
13	Pelayaran dalam negeri	1,2%	Peredaran bruto	KMK/417/1996
14	Konstruksi pengusaha kecil, pengadaan s/d 1	2%	DPP PPN	Ps 4 (2) UU PPh

	milyard			
15	BBM jenis premix, super TT dan gas oleh penyalur/agen pertamina	0.3%	Penjualan	KMK/384/2001
16	Hasil tembakau	0.15%	Harga bandrol	KMK/402/2001
17	Semen	0,25%	DPP PPN	
18	Selisih lebih hasil revaluasi	10%	Selisih lebih kompensasi rugi	

Sumber :Azhari,2008:105

Pajak penghasilan yang bersifat tidak final

Pajak atau penghasilan yang telah dipungut oleh pihak lain dan tidak bersifat final, dapat diperlakukan sebagai kredit pajak atau sebagai pengurang jumlah pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak.

Contoh adalah PPh pasal 21, untuk wajib pajak orang pribadi, dan PPh pasal 22, 23 untuk wajib pajak badan.

R. Pajak Tangguhan

Penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penghasilan sebelum pajak dihitung berdasarkan standar yang disusun oleh propesi yang dikenal sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Oleh karena basis pengenaan penghasilan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan berbeda dengan basis perhitungan penghasilan untuk keperluan komersil, atau dengan perkataan lain, akibat dari perbedaan rekognisi penghasilan dan biaya, maka akan terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua basis tersebut. Pajak

penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah, disebut dengan PPh terutang, sedang pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum kena pajak disebut sebagai beban pajak penghasilan.

Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang dengan beban pajak yang dimaksud, sepanjang menyangkut perbedaan temporer. Hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersil, dalam akun pajak tangguhan baik aset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhannya.

Jones Sally M dan Rhoades- Catanch Shelly C. mengungkapkan bahwa perbedaan tempore tidak berpengaruh terhadap perhitungan beban pajak, tarif pajak efektif atau rekonsiliasi antara tarif pajak efektif dengan tarif berdasarkan UU. Perbedaan temporer tersebut akan menghasilkan baik aset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan dapat disamakan seperti lebih bayar pajak yang akan diganti dimasa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan pajak perusahaan, sedangkan sebaliknya, kenaikan netto kewajiban pajak tangguhan menyebabkan kenaikan beban pajak perusahaan.

1. Kewajiban Pajak Tangguhan

Diasumsikan bahwa penghasilan sebelum kena pajak dan penghasilan kena pajak sebelum akumulasi penyusutan sama besarnya yaitu Rp.200.000.000,00 penyusutan menurut pembukuan perusahaan yang menggunakan metode garis lurus

berjumlah Rp 20.000.000,00, sedangkan penyusutan untuk keperluan perpajakan, akan menggunakan metode saldo ganda menurun berjumlah Rp.30.000.000.00, apabila besarnya tariff pajak adalah sebesar 20% maka perhitungan dan jurnal atas data tersebut menjadi sebagai berikut:

Uraian	Basis akuntansi (Rp)	Basis pajak (Rp)
Penghasilan sebelum pajak SAP	200.000.000.00	200.000.000.00
Penghasilan kena pajak SAP	<u>20.000.000.00</u>	<u>30.000.000.00</u>
Akumulasi penyusutan	180.000.000.00	170.000.000.00
Dasar pengenaan pajak		
Tarif	<u>30%</u>	<u>30%</u>
Beban pajak	54.000.000.00	
Pajak tangguhan		51.000.000.00
Kewajiban pajak tangguhan	(54.000.000-51.000.000)=	3.000.000.00

Jurnal yang dibuat adalah :

No.	Perkiraan	Debet	Kredit
	Beban pajak	Rp. 54.000.000.00	
	Pajak terutang		Rp. 51.000.000.00
	Kewajiban pajak tangguhan		Rp. 3.000.000.00

2. Akuntansi Pajak Tangguhan

Munculnya aset pajak tangguhan apabila penghasilan sebelum pajak lebih kecil dari penghasilan kena pajak yang berarti beban pajaknya pun akan lebih kecil dari pajak terutang. Aset pajak tangguhan tersebut dapat dihitung dengan cara

mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang berlaku pada saat perbedaan tersebut terpulihkan.

Aset pajak tangguhan neto akan dicatat sebagai keuntungan pajak yang diperkirakan terealisasi di masa mendatang. Aset pajak tangguhan bruto akan berkurang jumlahnya, apabila ada penyelisihan penilaian yaitu semacam perkiraan kontra yang terjadi apabila aset pajak tangguhan bruto tidak seluruhnya terealisasi, atau dengan perkataan lain aset tangguhan neto merupakan jumlah pajak yang terealisasi saja.

Contoh:

Penghasilan sebelum pajak PT.ABC berjumlah Rp.1.100.000.000.00 satu-satunya perbedaan temporer yang terdapat dalam perusahaan adalah pengeluaran biaya garansi yang tercatat dalam pembukuan sebesar Rp. 100.000.000.00 yang dihitung dari angka penjualan, sedangkan untuk kepentingan perpajakan yang dihitung berdasarkan jumlah yang dibayar adalah sebesar Rp. 30,000,000.00 atau dengan perkataan lain yang muncul Rp.70,000,000.00 dari jumlah perbedaan temporer tersebut Rp.60,000,000.00 diperlakukan dapat direalisasi lebih dari 50%, sedangkan sisa perbedaan temporer Rp. 10,000,000.00 merupakan jumlah yang memungkinkan dapat direalisasi kurang dari 50%. Apabila diketahui besarnya pajak adalah 30%, maka perhitungan yang relevan yang terlihat sebagai berikut:

Uraian	Pembukuan	U.U. Pajak
Penghasilan sebelum pajak	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
Biaya garansi	<u>100,000,000.00</u>	<u>30,000,000.00</u>
Penghasilan	1,000,000,000.00	1.070,000,000.00

Jurnal untuk mencatat perbedaan temporer adalah:

No.	Perkiraan	Debit	Kredit
	Beban pajak(0,3 x 1,000,000,000)	Rp.300,000,000.00	
	asset pajak tangguhan (0,3 x 70,000,000)	Rp. 21,000,000.00	
	PPH terutang (0,3 x 1.070.000.000)		Rp.321,000,000.00

S. Pajak Dalam Islam

1. Definisi pajak

Dalam istilah bahasa Arab, Pajak dikenal dengan nama AL-Usyra atau AL-Maks atau juga disebut Adh-Dharibah yang artinya Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh penarik pajak atau juga disebut Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.

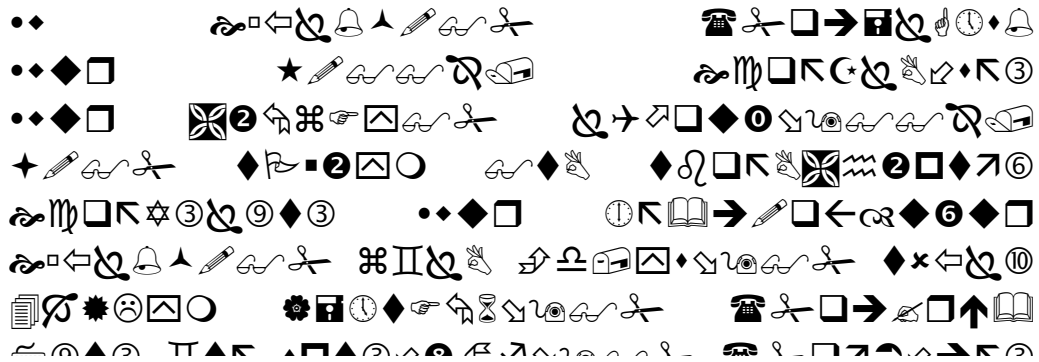
Adapun menurut ahli bahasa pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Pajak secara harfiah tidak dijelaskan dalam AL-Qur'an maupun dalam sunah mengenai status hukumnya.sistem perpajakan telah lama dikenal oleh

sejumlah umat manusia. Sebagaimana dalam catatan sejarah ada konsep makna yang diberikan kepada pajak antara lain adalah:

- a. Pajak dengan konsep upeti (udhiyah) atau persembahan kepada raja. Negara dengan pajak upeti ini adalah Negara sepenuhnya tunduk pada kepentingan raja, eliet penguasa.
- b. Pajak dengan konsep kontrak prestasi (jizyah: AL-Qur'an) antara rakyat pembayar pajak terutama yang kuat dan pihak penguasa. Negara pajak jizyah ini adalah Negara yang mengabdikan pada kepentingan eliet penguasa dan kelompok.
- c. Pajak dengan konsep etik dan ruh zakat yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamatkan kepada Negara untuk kemaslahatan segenap rakyat terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun agama, etnis, ras, maupun golongannya. (Mas'aud : 71).

Al-Manar karangan M, Rasyid Ridaha mengatakan bahwa pajak baru dikenal pada abad IX hijriah, pada Nabi Muhammad SAW pajak baru diwajibkan kepada orang-orang kafir Dzimnya dan Harby. Yang dilatarbelakangi surat At-taubah (9 : 29) yaitu :



Artinya :

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah). (Yaitu orang-orang) yang diberikan AL-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

2. Pajak Bukan Zakat

Imam Abu Ja'far At-Thahawi Rahimahumullah dalam kitabnya Syarh Ma'ani Al-Attsar (2/30-31), berkata bahwa Al-usyr yang telah dihapus kewajibannya oleh Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam atas kaum muslimin adalah pajak yang biasanya dipungut oleh kaum jahiliyah. Kemudian beliau melanjutkan :”.....hal ini sangat berbeda dengan kewajiban zakat....”.

Perbedaan lain yang sangat jelas antara pajak dengan zakat diantaranya:

- a. Zakat adalah memberikan sebagian harta menurut kadar yang ditentukan oleh Allah bagi orang yang mempunyai harta yang telah sampai pada nisabnya. Sedangkan pajak tidak ada ketentuan yang jelas kecuali oleh penguasa di suatu tempat.
- b. Zakat berlaku bagi kaum muslimin saja, hal ini lantaran zakat berfungsi untuk menyucikan pelakunya, dan hal itu tidak mungkin kita katakana kepada orang kafir, karena orang kafir tidak akan menjadi suci melainkan harus beriman terlebih dahulu. Sedangkan pajak berlaku bagi orang-orang kafir yang tinggal di tanah kekuasaan kaum muslimin.
- c. Yang dihapus oleh Rasulullah SAW tentang penarikan sepersepuluh dari harta manusia adalah pajak yang biasa ditarik oleh kaum jahiliyah. Adapun zakat, maka ia bukanlah pajak, karena zakat termasuk bagian dari harta yang wajib ditarik oleh imam/pemimpin dan dikembalikan/diberikan kepada orang-orang yang berhak.
- d. Zakat adalah salah satu bentuk syari'at Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pajak merupakan sunnahnya orang-orang jahiliyah yang asl-usulnya biasa dipungut oleh para raja Arab, dan diantara kebiasaan mereka ialah menarik pajak sepersepuluh dari barang dagangan manusia yang melalui/melewati daerah kekuasaanya.

Diantara pemasuk sumber Negara yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ialah:

1. Zakat yaitu kewajiban setiap muslimin yang mempunyai harta hingga mencapai nisabnya. Disamping pemilik harta berhak mengeluarkan sendiri zakatnya dan diberikan kepada yang membutuhkan, kemudian zakat itu dikumpulkan para petugas zakat (amil) yang ditugaskan oleh pemimpinnya, dan dibagikan sesungguhnya ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam AL-Qur'an surat At-taubah: kita lihat adanya amil-amil zakat yang ditugaskan oleh pemimpin kaum muslim yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW.
2. Harta warisan yang tidak habis terbagi. Didalam ilmu waris (faraidh) pembahasan harta yang tidak terbagi. Ada dua pendapat yang masyhur dikalangan faraidh. Pendapat pertama, harus dikembalikan kepada masing-masing disesuaikan dengan kedekatan mereka kepada mayit, kecuali salah satu pada istri. Pendapat kedua mengatakan semua harta yang tidak terbagi/kelebihan maka dilakukan di baitul mal/kas Negara. Walaupun demikian, suatu ketika harta yang berlebih itu dikembalikan kepada masing-masing ahli waris, misal ada seseorang meninggal warisannya seorang janda saja maka janda tersebut mendapat haknya $\frac{1}{6}$ dan sisanya mau tidak mau dikembalikan ke baitul mal.

3. Jizyah adalah harta/ upeti yang diambil dari orang-orang kafir yang diizinkan di Negeri Islam sebagai jaminan keamanannya.
4. Ghainimah dan Fai'. Ghainimah adalah harta orang kafir (al-harbi) yang dikuasi muslimin dengan adanya peperangan. Sedangkan Fai' adalah harta orang kafir yang ditinggalkan dan dikuasai oleh kaum muslimin tanpa adanya peperangan.
5. Shadaqah tathawaf yaitu rakyat menyumbang dengan suka rela kepada Negara di gunakan kepentingan bersama.
6. Hasil tambang dan semisalnya.(Alnanhaj. Or.id)

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Aras Puan cipi merupakan salah satu perusahaan nasional dengan badan hukum perseroaan yang berkedudukan di Tenayan Raya, Kelurahan rejosari perusahaan ini bergerak dibidang jasa kolam renang.

PT. ARAS PUAN CIPI membentuk satuan tugas untuk mengadakan peninjauan dan sekaligus mempersiapkan pembangunan kolam renang baik secara prosedur maupun pelaksanaan fisiknya, dimana lokasi perkantoran dan lokasi operasionalnya PT. ARAS PUAN CIPI terletak di tenayan raya, kelurahan rejosari.

B. Struktur Organisasi

Agar suatu perusahaan dapat dikelola dengan baik dan efektif, maka harus ada distribusi tugas dan tanggung jawab. Dalam organisir suatu kegiatan langkah pertama yang diperlukan oleh pimpinan perusahaan adalah menetapkan pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dikerjakan agar dapat merelisasi apa yang menjadi tujuan perusahaan.

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab yang ada dalam struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Komisaris utama

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi setelah pemegang saham, menetapkan arah, target tahunan dan kebijakan pokok perusahaan serta mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat tertinggi perusahaan.

Tugas dan wewenang komisaris utama adalah:

- a. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS)
- b. Mengatur, mengarahkan, mengembangkan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
- c. Mengawasi jalannya perusahaan
- d. Memeriksa laporan atau dokumen-dokumen penting perusahaan.

2. Direktur Utama

Tugas dan wewenang direktur utama adalah :

- a. Menguraikan dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam rangka pencapaian tujuan berdasarkan pedoman yang telah digariskan oleh dewan komisaris.
- b. Mengkoordinir dan memberikan pengarahan-pengarahan agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik.
- c. Mengevaluasi adanya aktivitas operasional perusahaan.
- d. Menentukan strategi sasaran yang ingin dicapai dan memimpin para manajer untuk mencapai sasaran yang dimaksud dengan adanya itu kita dapat merasakan adanya sistem.

3. Divisi kolam

Bagian ini di pimpin oleh seorang asisten manager yang mempunyai fungsi utama memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan kolam renang.

Berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Kantor pusat

Memeriksa dan mengevaluasi realisasi pekerjaan yang telah dicapai untuk dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

b. Keuangan

1. Menyusun dan membuat laporan keuangan guna penyajian kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Melakukan perencanaan, penerimaan dan pengeluaran kas baik jangka panjang maupun jangka pendek.

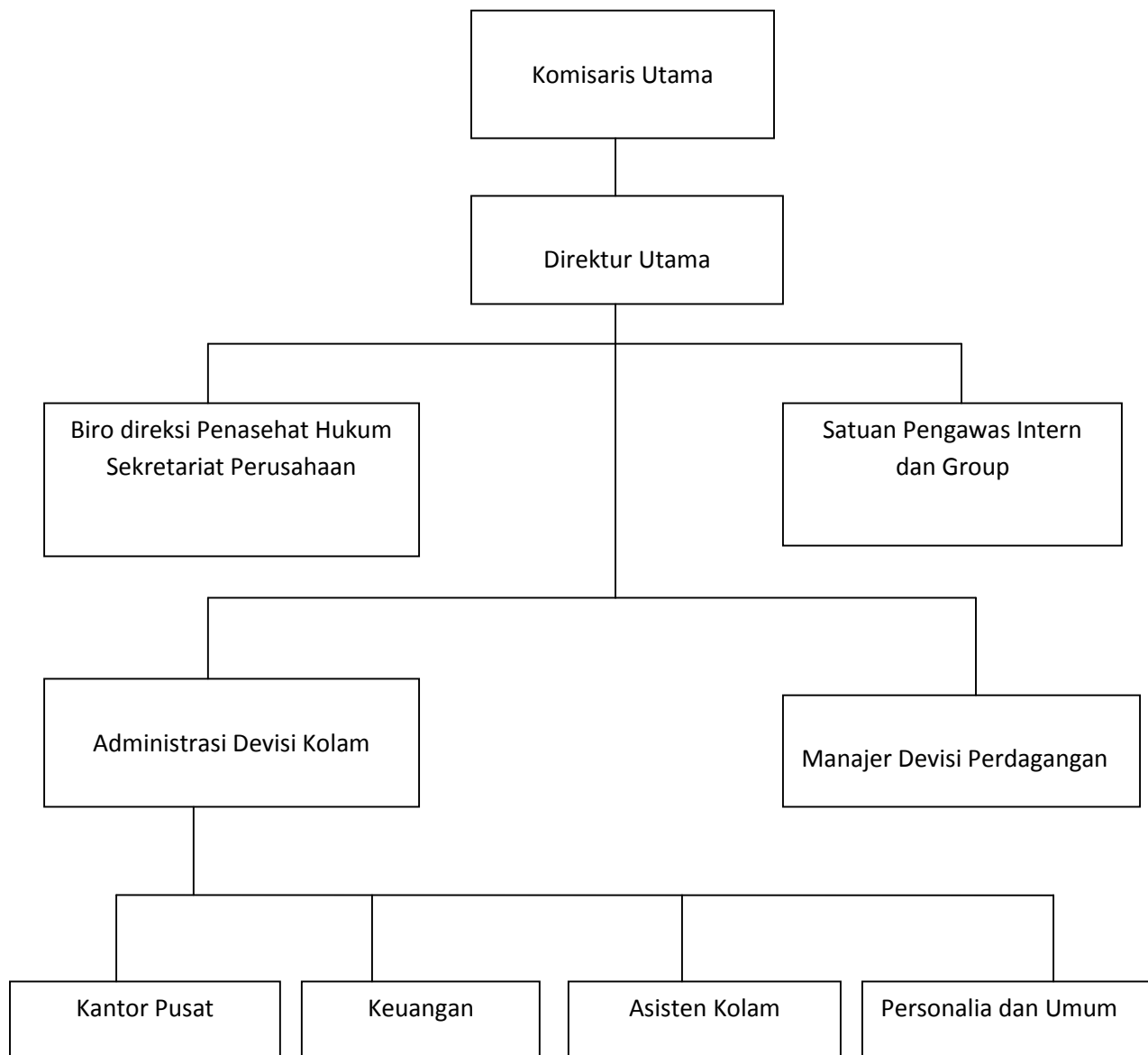
c. Asisten kolam

Melakukan pengecekan alat-alat kolam renang guna mendukung hasilnya berupa tempat dan keadaan kolam renang yang kondusif dan nyaman.

d. Personalia dan umum

Bagian ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengatur administrasi yang berkenaan dengan masalah kepegawaian dalam perusahaan.
2. Menangani masalah jaminan sosial serta kesejahteraan karyawan

Gambar III.I**STRUKTUR ORGANISASI
PT. ARAS PUAN CIPI**

Sumber : PT Aras Puan Cipi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan laba rugi mengihtisarkan pendapatan yang diperoleh dan beban yang memperhitungkan selama jamgka waktu tertentu. Perusahaan membuat laporan keuangan lainnya yang berakhir pada 31 Desember

Dari laporan perhitungan laba rugi dapat dilihat jumlah laba yang diperoleh perusahaan belum diadakan koreksi fiskal, karena laba yang disajikan tersebut adalah laba komersial yang tentunya memiliki perbedaan dengan laba fiskal.

A.Perhitungan Laba menurut Standar Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan

Laporan laba rugi menurut standar akuntansi keuangan merupakan suatu laporan yang disajikan oleh Perusahaan yang berfungsi mengukur kinerja keuangan selama satu periode tertentu. Kinerja tersebut ditunjukan dengan aktifitas pendapatan dikurangi dengan beban-beban yang terkait dengan upaya memperoleh pendapatan yang bersangkutan.

Sedangkan perhitungan netto fiskal menurut UU Perpajakan dihitung dengan cara laba/rugi komersil ditambahkan dengan koreksi fiskal positif dan dikurangi dengan koreksi fiskal negatif. Penghasilan netto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian mendapatkan penghasilan kena pajak. Besarnya pajak terhutang adalah tarif PPh pasal 17 x penghasilan kena pajak.

Berikut ini penulis akan membahas komponen-komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi PT. Aras Puan Cipi periode 31 Desember 2011.

1. Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dan ekonomis yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pendapatan Usaha merupakan hasil yang diperoleh Perusahaan dalam Tahun 2011 yaitu Rp. 286.189.000,- angka ini yang merupakan sumber penghasilan yang utama bagi perusahaan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan. Pendapatan sebesar Rp 286.189.000,- masih merupakan penghasilan bruto yang belum dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi selama periode 2011 sebagaimana yang telah disajikan dalam laporan laba-rugi perusahaan periode Januari s/d Desember 2011.

2. Beban

PT. Aras Puan Cipi menyusun laporan keuangan mengelompokkan 2 (dua) bagian beban antara lain harga pokok pendapatan dan biaya umum dan administrasi. Harga Pokok Pendapatan sebesar Rp. 168.851.510,-

Kemudian didalam penyusunan laporan keuangan bagian biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum perusahaan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel IV.1**Laporan laba/ rugi**

Pendapatan		Rp. 286.189.000
Harga Pokok pendapatan		<u>Rp. 168.851.510</u>
Laba Kotor Penjualan		Rp 117.337.490
Biaya umum dan administrasi		
Biaya Gaji Karyawan	Rp. 15.600.000	
Biaya Sumbangan	Rp. 5.500.000	
Biaya Listrik	Rp. 7.736.520	
Biaya perawatan gedung	Rp. 11.520.000	
BBM, Service & Pemeliharaan	Rp. 2.256.000	
Biaya Entertainment	Rp. 3.500.000	
Biaya Dokumentasi Perusahaan	Rp. 2.800.000	
Biaya Telepon	Rp. 1.800.000	
Biaya ATK	Rp. 874.700	
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	Rp. 63.702.456	
Total Biaya		<u>Rp. 115.239.682</u>
Laba Netto sebelum pajak		Rp. 2.097.809

B.Perhitungan Laba Menurut Undang-undang Perpajakan

Berdasarkan keterangan diatas sebagaimana yang telah dijelaskan diatas ditemukan adanya beberapa ketidaksesuaian antara yang dilakukan perusahaan

dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Perpajakan, ketidaksesuaian tersebut penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan staf keuangan antara lain:

1. Biaya Entertainment

Biaya entertainment pada prinsipnya boleh dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak, akan tetapi wajib pajak harus membuat daftar nominatif dalam SPT Tahunan. Dari laporan SPT PT. Aras Puan Cipi ternyata perusahaan tidak melampirkan daftar nominatif dalam SPT tersebut. Oleh karena itu PT Aras Puan Cipi harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 3.500.000,-

Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 Tentang Biaya Entertainment dan sejenisnya (Seri PPh Umum18) Direktur Jenderal Pajak.

Berkenaan dengan banyak pertanyaan mengenai biaya entertainment, representase, jamuan tamu dan sejenisnya yang dapat dikurangkan dari penghasilan, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Biaya entertainment, representase, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang pajak penghasilan 2008.
2. Wajib pajak harus dapat membuktikan, biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan

kegiatan perusahaan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan Perusahaan (materiil).

3. Oleh karena itu, Wajib Pajak yng mengurangi biaya-biaya tersebut dari pnghasilan brutonya, sejak tahun pajak 1986 agar Melampirkan Pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominative seperti terlampir yang berisi :

- a. Nomor urut
- b. Tanggal “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
- c. – Nama Tempat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan
 - Alamat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - Jenis “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - Jumlah (Rp) “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
- d. relasi usaha yang telah diberikan “entertainment” dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut diatas berisi :
 - Nama
 - Posisi
 - Nama Perusahaan
 - Jenis Usaha

4. Apabila petugas pajak melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan tahunan tahun 1984 dan 1985 menemukan pos biaya “entertainment” dan sejenisnya, maka kepada wajib pajak seyogyanya dimintakan daftar nominatif seperti tersebut untuk membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan Perusahaan.

2. Biaya Sumbangan

Dalam laporan L/R dapat juga dilihat bahwa PT Aras Puan Cipi memasukkan biaya sumbangan sebesar Rp. 5.500.000,- sebagai pengurangan laba sebelum pajak. Sedangkan Menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 perpajakan pasal 9 ayat 1 huruf g UU PPh harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan tidak boleh sebagai pengurangan penghasilan bruto, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

3. Biaya Penyusutan

Dalam metode penghitungan beban penyusutan. Perusahaan menetapkan persentase beban penyusutan untuk kendaraan dan bangunan sebesar 12%, sementara menurut Undang-undang perpajakan kedua jenis aktiva ini tidak sama penggolongannya. Menurut Keputusan Kementrian Keuangan No.138/KMK.03/2002 Sepeda motor termasuk kelompok I yang disusutkan selama 4 tahun (25%), dan sedangkan menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 11 bangunan permanen kelompok II yang disusutkan selama 20 tahun (5%).

Daftar Perhitungan penyusutan

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Harga pokok	Menurut perusahaan		Menurut perpajakan		Selisih
Kendaraan Kel. I	6.500.000,-	780.000,-	12%	1.625.000,-	25%	845.000,-
Bangunan Kel. II	450.000.000, -	54.000.000,-	12%	22.500.000,-	5%	31.500.000,-
Jumlah						32.345.000,-

Sumber: Data Olahan

Dibawah ini penulis membuat laporan koreksi fiskal atau laporan komersial yang seharusnya di buat oleh perusahaan :

Gambar III. 2

Laporan Koreksi Fiskal

(Dalam rupiah)

	Laporan komersial	Koreksi fiskal	Laporan fiskal
Pendapatan	286.189.000		286.189.000
HPP	<u>168.851.510</u>		<u>168.851.510</u>
Laba kotor	117.337.490		117.337.490
Biaya umum & Administrasi			
Biaya gaji karyawan	15.600.000		15.600.000
Biaya sumbangan	5.500.000	(5.500.000)	0
Biaya listrik	7.736.520		7.736.520
Biaya perawatan gedung	11.520.000		11.520.000
BBM,service & pemeliharaan kendaraan	2.256.000		2.256.000
Biaya entertainment	3.500.000	(3.500.000)	0
Biaya dokumentasi perusahaan	2.800.000		2.800.000
Biaya telepon	1.800.000		1.800.000
Biaya ATK	824.700		824.700
Biaya penyusutan aktiva tetap	63.702.456	32.345.000	63.702.456
Total	115.239.682		106.239.676

Laba sebelum pajak	2.097.809		11.097.814
Pajak PPh	293.613		924.817
Laba setelah pajak	1.804.195		10.172.997

Sumber : Data olahan

C.Penyajian Aktiva Tetap Dalam Neraca

Dari laporan neraca per tanggal 31 Desember 2011 (terlampir) dapat dilihat bahwa perusahaan tidak menyajikan aktiva tetap (kendaraan dan inventaris) sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan.

Perusahaan dalam menyajikan aktiva tetap (kendaraan dan Investaris) sebesar nilai perolehan tanpa memperhitungkan akuntansi penyusutan. Oleh karena itu penulis berpendapat perusahaan seharusnya menyajikan aktiva tetap disajikan nilai perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, penulis akan mencoba untuk memberikan kesimpulan dan saran dari uraian dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perusahaan memasukan biaya-biaya yang Menurut Undang-undang perpajakan tidak boleh sebagai pengurangan penghasilan.

- a. Biaya Entertainment

PT. Aras Puan Cipi memasukkan biaya entertainment sebesar Rp. 3.500.000 sebagai pengurangan penghasilan. Sedangkan biaya entertainment pada prinsipnya boleh dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak, akan tetapi wajib pajak harus membuat daftar nominative dalam SPT Tahunan.dari laporan SPT PT. Aras Puan Cipi ternyata tidak melampirkan daftra nominative dalam SPT tersebut.

- b. Biaya Sumbangan

Dalam laporan L/R dapat juga dilihat bahwa PT Aras Puan Cipi memasukan biaya sumbangan sebesar Rp. 5.500.000,- sebagai pengurangan laba

sebelum pajak. Sedangkan Menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 perpajakan pasal 9 ayat 1 huruf g UU PPh harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan tidak boleh sebagai pengurangan penghasilan bruto, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

c. Biaya Penyusutan

Dalam metode penghitungan beban penyusutan. Perusahaan menetapkan persentase beban penyusutan untuk kendaraan dan bangunan sebesar 12%, sementara menurut Undang-undang perpajakan kedua jenis aktiva ini tidak sama penggolongannya. Menurut Keputusan Kementrian Keuangan No.138/KMK.03/2002 Sepeda motor termasuk kelompok I yang disusutkan selama 4 tahun (25%), dan sedangkan menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 11 bangunan permanen kelompok II yang disusutkan selama 20 tahun (5%).

d. Penerapan akuntansi pada PT. Aras Puan Cipi belum sesuai dengan peraturan perpajakan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penulis pada bab pembahasan dan penelitian ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain :

1. Seharusnya perusahaan tidak memasukkan biaya Entertainment sebagai pengurangan penghasilan, jika ingin mengurangkannya perusahaan harus membuat daftar nominatif.
2. Perusahaan sebaiknya tidak memasukkan biaya sumbangan sebagai pengurangan penghasilan.
3. Sebaiknya perusahaan mengelompokkan asset sesuai dengan ketentuan perpajakan.
4. Sebaiknya perusahaan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sufyan Raji, 2007, *250 Aktalita Masalah Agama*, Jilid I Penerbit Pustaka Al-Riyaldi, Jakarta.
- Agoes, Sukrisno & Trisnawati Estralita, 2007, *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Al-Manhaj. Or. Id, *Pajak Dalam Islam*, Persaksian Para Salapuah shalib Tentan Pajak
- Al-Quranulkarim, *At-Taubah* :29
- Azhari, 2008, *Pajak Penghasilan*, Penerbit Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau
- Bastian, Indra, 2006, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua, Penerbit salemba Empat, Jakarta.
- Belkaoui, Ahmed Riahi, 2006, *Teori Akuntansi*, Terjemah Ali Akbar Yulianto Risnawati Dermauli, Edisi 5, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Donald E Kieso, Jerry J Wegandt, Terry D Warfield, 2007, *Akuntansi Intermediet*, Jilid II, Edisi Kesepuluh, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- James M. Reeve, Carlt S. Warren, Jonathan E. Duchac, Ersu Tri Wahyuni, Gatot Soepriyanto, Amir Abadi Jusuf, Chaerul D. Djakman, 2009, *Prinsip-Prinsip akuntansi*, Penerjemah Darmayanti Dian, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Penerbit Grasindo, Jakarta
- Mardiasmo. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008
- Mardiasmo. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009
- Mardiasmo. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011

- Markus, Muda Lalu Hendry Juana, 2002, *Petunjuk Umum Perpajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Markus, Muda. *Perpajakan Indonesia suatu Pengantar*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005
- Nurmantu, Safri, 2006, *Pengantar perpajakan* ; Edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Pajak Terapan Brevet A& B. 2008
- Prabowo, Yusdianto, 2003, *Akuntansi Perpajakan Terapan*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Primadita Fitriandi, Yuda Aryanto, Agus Puji Priyono, 2011, *Komplikasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, Penerbit Salemba Empat.